

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN

KPPN SOLOK



TIM *penyusun*

PENANGGUNGJAWAB

Budi Utomo

KETUA TIM

Andi Mulyadi

PENYUSUN

Fitri Arif Yulianto

KONTRIBUTOR

Bayu Hendro Asmoro

Gisela Phabet

Arya Novanda

Anggi Rizki F.

DESAIN

Sania Zelvira



DAFTAR *isi*

Executive Summary

01

Data Belanja K/L

06

**Permasalahan
Semester II TA 2021**

22

Early Warning

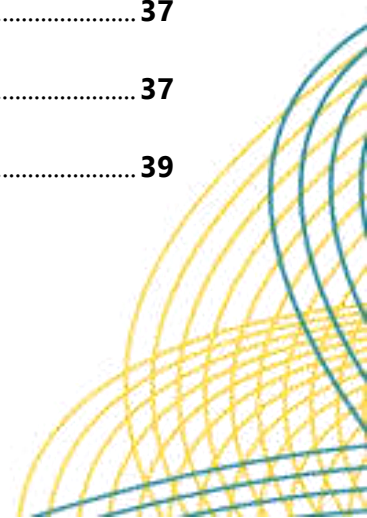
43





DAFTAR *grafik*

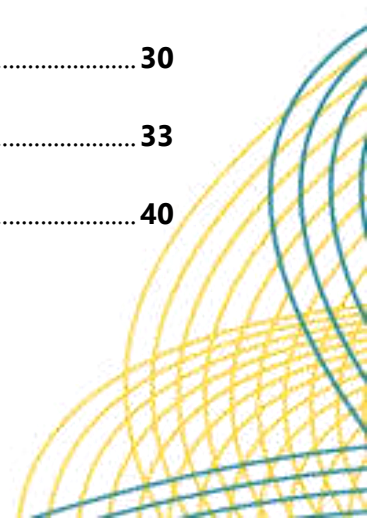
Grafik 2.1.1 Pagu dan Realisasi TA 2021	Error! Bookmark not defined.
Grafik 2.1.2 Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 2.2.1.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	9
Grafik 2.2.2.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Fungsi	Error! Bookmark not defined.
Grafik 2.2.3.1 Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran per Kewenangan.....	Error! Bookmark not defined.
Grafik 2.2.4.1 Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	15
Grafik 2.3.1 Nilai IKPA Tahun 2021.....	18
Grafik 2.3.2 Perbandingan IKPA Tahun 2021 dan 2020.....	18
Grafik 2.4.1 Hal III DIPA, Realisasi, dan Deviasi Bulanan 2021	20
Grafik 3.1.1 Data UP/GUP	25
Grafik 3.4.1 Pagu dan Realisasi DFDD TA 2021	37
Grafik 3.4.2 Presentase Pagu dan Realisasi DFDD TA 2021	37
Grafik 3.5.1 Bimbingan Aplikasi melalui BAPer.....	39





DAFTAR *Tabel*

Tabel 2.2.1.1 Pagu dan Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2021	8
Tabel 2.2.1.2 Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja.....	10
Tabel 2.2.2.1 Pagu dan Penyerapan Anggaran per Fungsi Tahun 2021.....	12
Tabel 2.2.3.1 Pagu dan Penyerapan Anggaran per Kewenangan Tahun 2021.....	13
Tabel 2.2.3.2 Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja.....	13
Tabel 2.2.4.1 Pagu dan Penyerapan Anggaran per Kewenangan Tahun 2021.....	14
Tabel 2.2.5.1 Pagu dan Penyerapan Anggaran per K/L Tahun 2021	16
Tabel 2.4.1 Halaman III DIPA, Realisasi dan Deviasi Bulanan Tahun 2021	21
Tabel 3.1.1 UP KKP Satker Wilayah Kerja KPPN Solok.....	23
Tabel 3.2.1 Peserta Digipay Wilayah Kerja KPPN Solok.....	29
Tabel 3.2.2 Satker Peserta Digipay Wilayah Kerja KPPN Solok.....	29
Tabel 3.2.3 Transaksi Digipay.....	30
Tabel 3.3.1 Pagu Minus Satker Wilayah Kerja KPPN Solok.....	33
Tabel 3.5.1 Bimbingan Satuan Kerja melalui BAPER	40





BAB 1

EXECUTIVE SUMMARY

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tahun 2021 tingkat KPPN telah berhasil disusun dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RPA ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan RPA ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kinerja pelaksanaan anggaran sepanjang tahun 2021 di wilayah kerja KPPN Solok yaitu Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Reviu ditekankan pada permasalahan dalam pencairan anggaran pada satuan kerja Kementerian/Lembaga dan penyaluran belanja transfer ke daerah berupa DAK Fisik dan Dana Desa beserta isu-isu penting pelaksanaan anggaran tahun 2021. Dari hasil reviu tersebut dapat diketahui apakah belanja pemerintah telah dilaksanakan dengan baik dan berkualitas walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19. Selanjutnya, diperlukan juga *early warning* yang dilakukan KPPN untuk mitigasi risiko pelaksanaan anggaran yang mungkin terjadi pada tahun 2022 dan strategi yang dapat dilakukan KPPN untuk mencegah terjadinya permasalahan penyaluran dana APBN.

Besar harapan kami bahwa RPA Tahun 2021 ini dapat menjadi referensi dan masukan bagi para *stakeholders* dan menjadi alat ukur dalam perencanaan kegiatan dan anggaran di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan menyempurnakan sistem pelaksanaan anggaran sehingga penyaluran dana APBN di daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja KPPN Solok.

Kotobaru, Februari 2022

Kepala KPPN Solok

Budi Utomo

EXECUTIVE SUMMARY

Sepanjang tahun 2021 Indonesia mengalami berbagai dinamika dan tantangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Diawali dengan lonjakan pertama pada Januari, yang diikuti lonjakan kedua pada Juli lalu, hingga Desember saat ini kasus terkendali. Jika melihat kembali kasus positif, tahun ini terjadi 2 kali lonjakan. Yang pertama dimulai pada akhir 2020, dan terus meningkat mencapai puncaknya pada 25 Januari 2021. Lonjakan ini berhasil diturunkan selama 15 minggu berturut-turut. Saat itu, lonjakan diatasi berbarengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan Posko pada tiap desa/kelurahan. Dampak kebijakan ini, menurunnya kasus hingga 70,5% dari puncak kasus pertama, dan mencapai titik kasus terendah pada pertengahan Mei. Selanjutnya, lonjakan kedua puncaknya pada bulan Juli. Penyebabnya varian Delta yang diberi peluang menular akibat tingginya mobilitas selama periode Idul Fitri 2021. Kasus melonjak signifikan hingga mencapai puncaknya sebesar 1200% dari titik terendah pada bulan Mei, hanya dalam waktu 9 minggu. Kesiapan penanganan dan pelaksanaan vaksinasi secara masif, membuat angka kasus COVID-19 mulai menurun pada Triwulan IV tahun 2021. Dengan daya dan upaya yang dimiliki Indonesia, menunjukkan kemampuan adaptasi, kesiapan dan resiliensi seluruh lapisan masyarakat dalam penanganan pandemi. Ini menjadi modal penting Indonesia untuk terus bertahan melawan tantangan pandemi yang dinamis, karena kita belum tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini.

Dalam situasi seperti saat ini, APBN memiliki peran yang sangat penting sebagai stimulus untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu APBN harus dikelola secara kredibel, efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Peran Pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk penanggulangan pandemi sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat secara luas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja KPPN Solok meliputi tiga Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok.

Sesuai dengan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Solok. Selain itu juga menyediakan data rewiu belanja dan telaah makro pelaksanaan anggaran serta memastikan proses pelaksanaan anggaran Satker dalam lingkup wilayah kerjanya tetap berjalan sesuai rencana, regulasi dan kebijakan. Salah satu output dari pelaksanaan monev pelaksanaan anggaran dimaksud adalah Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) Tingkat KPPN Semester II TA 2021.

RPA ini merupakan output atau hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi belanja APBN yang dilakukan sepanjang Semester II TA 2021. Sejalan dengan aktivitas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran yang dilakukan selama TA 2021 melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), RPA Semester I tahun 2021 merangkum permasalahan-permasalahan terkait capaian kinerja pelaksanaan anggaran pada tingkat satker yang ditemui pada saat pelaksanaan EPA, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan anggaran hingga menyimpulkan dan merumuskan rekomendasi yang bersifat teknis dan aplikatif. Disamping memuat analisis terkait isu-isu pelaksanaan anggaran secara umum, RPA Semester I TA 2021 juga menyajikan analisis tematik terkait capaian atas realisasi anggaran dan capaian output dari pelaksanaan belanja APBN di Wilayah KPPN Solok.

Secara umum dapat disampaikan bahwa pelaksanaan belanja APBN di KPPN Solok selaku Bendahara Umum Negara (BUN) sampai dengan Semester II 2021 dari sisi penyerapan anggaran, belanja K/L yang pada tahun 2021 mendapatkan pagu sebesar Rp 774,7 milyar, berhasil terserap Rp 747,8 miliar atau mencapai 96,53%. Pagu tersebut terdiri dari Pagu Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sebesar Rp424,18 miliar atau sebesar 54,75% dan Pagu Belanja Transfer ke Daerah yang terdiri dari belanja DAK Fisik dan belanja Dana Desa sebesar Rp350,55 miliar atau 45,25%.

Tidak hanya dari sisi penyerapan, kinerja APBN di Wilayah Kerja KPPN Solok pada Tahun 2021 juga lebih baik dari sisi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Dari hasil penilaian terhadap 13 indikator yang disediakan melalui OMSPAN, periode tahun 2021 nilai IKPA tingkat wilayah KPPN Solok untuk seluruh satker Kementerian Negara/ Lembaga adalah 97,04 atau lebih baik dari capaian tahun 2020 yang mendapatkan nilai 91,74. Hal yang menarik adalah capaian peningkatan ini justru didapatkan di tengah kebijakan relaksasi kebijakan yang diberikan oleh Ditjen

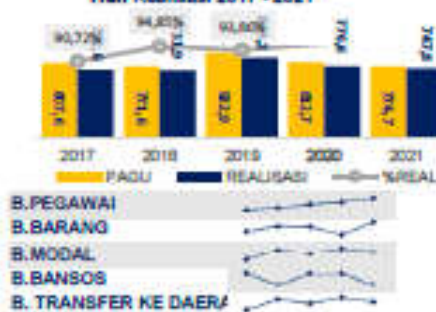
Perbendaharaan, khususnya diperkenalkannya penggunaan TUP untuk pembayaran operasional.

Beberapa kendala pelaksanaan anggaran masih banyak ditemukan pada pelaksanaan belanja sepanjang tahun 2020 di wilayah KPPN Solok. Beberapa kendala pelaksanaan masih merupakan kendala “klasik” yang acap kali berulang dari tahun ke tahun. Kendala terkait perencanaan anggaran yang *full top down* sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada, kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, permasalahan non teknis pada satker, *refocusing* dan realokasi, serta penundaan beberapa rencana kegiatan untuk dilaksanakan pada akhir TA 2021 karena fluktuasi pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Untuk Dana Desa, penyaluran di tahun 2021 sudah mencapai 100%, akan tetapi penyaluran DAK Fisik, masih ada Pemda yang tidak sanggup untuk menyelesaikan target yang telah ditetapkan, sehingga penyerapan DAK Fisik tidak sesuai harapan. Selain itu, tahun 2021 merupakan awal dari perubahan digitalisasi dalam pengelolaan APBN seperti SAKTI dan Digipay. Hal ini membutuhkan peningkatan kompetensi dari satuan kerja dengan mengoptimalkan pegawai yang terbatas pada setiap satuan kerja.

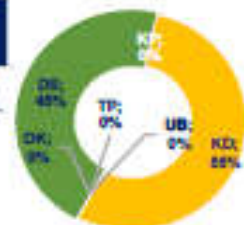
Selanjutnya *early warning* perlu dilakukan untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2022. KPPN harus dapat melakukan mitigasi risiko yang mungkin terjadi atas permasalahan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan anggaran. Strategi komunikasi dan edukasi kepada semua stakeholders diperlukan dalam rangka kebijakan dan digitalisasi dalam pengelolaan APBN. Peran KPPN menjadi sangat penting dalam mendukung dan memastikan kelancaran proses dimaksud, karena KPPN merupakan ujung tombak setiap perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan Ditjen Perbendaharaan di tengah-tengah masyarakat, kita hadir bukan hanya sebagai penyalur dana APBN, juga berperan sebagai guru untuk *sharing knowledge* perubahan untuk menjadi lebih baik.

Overview Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Tren Realisasi 2017 - 2021

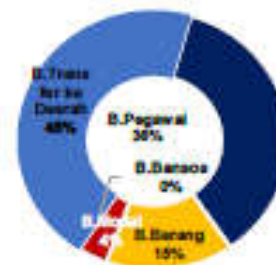


Pagu dan Realisasi TA 2021 per Kewenangan (Miliar)



Kategori	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi
Kantor Pusat	0	0	0%
Kantor Daerah	424	427	101%
Dekonsentrasi	0	0	0%
Tugas Pembantuan	0	0	0%
Desentralisasi	351	320,9	92%

Pagu dan Realisasi TA 2021 per Jenis Belanja (Miliar)



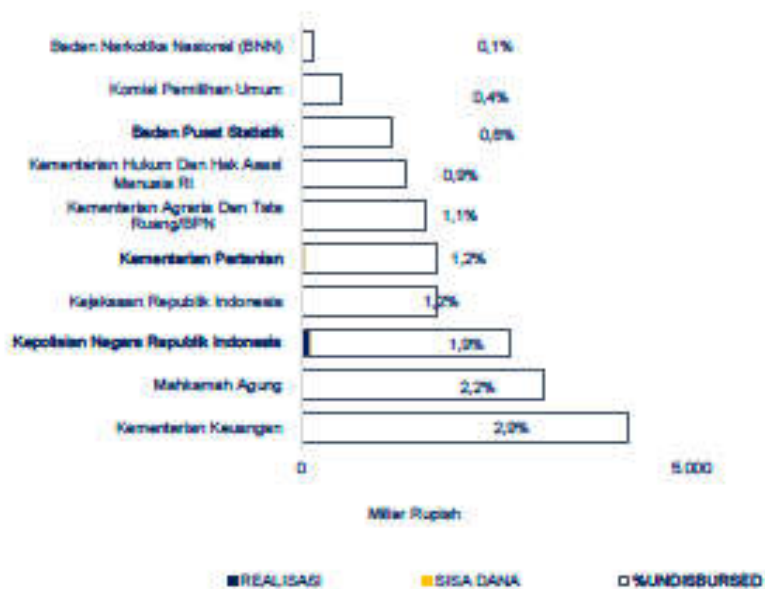
Jenis Belanja	Pagu (Miliar)	Realisasi (Miliar)	% Realisasi
Belanja Pegawai	279	284	102%
Belanja Barang	118	115	98%
Belanja Modal	27	27	99%
Belanja Banskos	0,0	0,0	0%
Belanja Transfer ke Daerah	350,5	320,9	92%

Realisasi 16 Sektor dengan Undisbursed Pagu Tertinggi

No.	Nama K/L	Pagu (M)	Real (M)	% Real	% Undisb*
1	Kppn Solok Pengelola Penyusunan Dana Alokasi Khusus	351	321	91,5%	110,3%
2	Polres Solok	40	40	99,4%	1,1%
3	Polres Solok Kota	40	40	99,9%	0,2%
4	Polres Solok Selatan	30	30	99,4%	0,6%
5	Kantor Kementerian Agama Kab. Solok	25	29	112,5%	-11,3%
6	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	21	21	99,5%	0,4%
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat	16	16	98,6%	0,8%
8	Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan	15	15	103,5%	-1,3%
9	Kantor Pelayanan Pajak Pradama Solok	13	12	94,0%	2,3%
10	Kantor Kementerian Agama Kota Solok	12	12	93,0%	2,3%
11	Kantor Kementerian Agama Kab. Solok	12	12	99,9%	0,0%
12	Lembaga Pemasyarakatan Solok	9	9	99,1%	0,3%
13	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Solok Kab. Solok	8	10	125,1%	-7,7%
14	Kepolisian Negeri Solok	7	7	96,4%	1,0%
15	Madrasah Aliyah Negeri 1 Solok Kab. Solok	7	8	115,3%	-3,3%
16	Sektor Lainnya	159	158	99,2%	4,0%
Total		775	745	96,5%	100,0%

Overview Aspek Tertentu

K/L dengan Kontribusi Undisbursed Tertinggi



*Undisbursed menunjukkan kontribusi lembaga/organisasi yang terdapat sisa dana berdasarkan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Capaian Nilai IKPA



Urutan Kinerja per Indikator

Indikator	Target	Realisasi	Nilai
Efektifitas Pelaksanaan			
Retur SP2D	30	30	100,0
Realisasi	0	0	100,0
Perselesaian Tagihan	119	119	98,0
Efisiensi Pelaksanaan			
Renkas	-	0	0
Realisasi	0	0	100,0
Perselesaian Tagihan	222	222	90,0
Kepatuhan Thd. Regulasi			
Data Kontrak	67	67	100,0
Pengelolaan UP	1.407	1.407	96,7
Rekon LPJ	779	779	99,9
Kesesuaian Perencanaan			
Revisi DIPA	410	410	99,8
Pagu Minus	-12,13	-12,13	99,7
Hal II DIPA	11,54%	11,54%	83,5

▲ Nilai IKPA lebih tinggi dari periode sebelumnya (YoY) ▼ Nilai IKPA lebih rendah dari periode sebelumnya (YoY)

Jumlah Kab/Kota	Jumlah Satker
3	66
Jumlah KPPN	Jumlah DIPA
1	66

Profil Wilayah

OVERVIEW PER JENIS BELANJA

Realisasi **Belanja Pegawai** secara keseluruhan telah mencapai target realisasi tahun 2021, realisasi sebesar 102,06%. Perhatian khusus perlu diarahkan pada Satker lingkup Kementerian Agama mengingat terjadi pagu minus pada akun belanja pegawai sebesar Rp12,9 miliar. Perencanaan anggaran tidak sesuai dengan rencana rekrutmen pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, sehingga setiap tahun pagu minus seluberlula

B. Pegawai

Realisasi **Belanja Barang** secara keseluruhan telah mencapai target realisasi tahun 2021, realisasi sebesar 97,62%. Realisasi selama tahun 2021 mengalami fluktuasi karena kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Penyerapan normal pada Triwulan I dan Triwulan II, akan tetapi menurun pada Triwulan III karena adanya varian Delta. Hal ini menyebabkan beberapa kegiatan ditunda karena ada pembatasan kegiatan.

B. Barang

Realisasi **Belanja Modal** secara keseluruhan belum mencapai target realisasi tahun 2021, realisasi sebesar 99,37%. Secara umum, permasalahan yang diidentifikasi terkait realisasi Belanja Modal antara lain tertundanya beberapa proses pengadaan barang/jasa serta sebagian besar pekerjaan mempunyai jangka waktu penyelesaian pada akhir t

B. Modal

Tahun 2021, tidak terdapat Pagu **Belanja Bansos** pada Satker lingkup KPPN Solok

B. Bansos

Realisasi **Belanja Transfer ke Daerah** secara keseluruhan telah mencapai target realisasi Tahun 2021, realisasi sebesar 93,32%, dengan rincian Dana Desa 100% dan DAK Fisik sebesar 86,63%. Khusus DAK Fisik, realisasi yang kurang optimal disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dalam DAK Fisik yang belum bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19, pergeseran alokasi anggaran di daerah, dan batas waktu penyaluran yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan penyaluran dan nenevesiaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditenankan.

B. TKDD

TINDAK LANJUT

1. Melakukan kegiatan pendampingan ataupun Bimtek dengan membuat clusterisasi satker berdasarkan capaian IKPA maupun dari tingkat realisasi anggaran, untuk mendukung prioritas pemerintah dalam mempercepat realisasi anggaran TA 2021
2. Mengoptimalkan forum-forum komunikasi yang ada (WA group, Telegram, Zoom meeting dll) dalam memberikan edukasi maupun sebagai bentuk asistensi kepada satker di wilayah kerja
3. Menginventarisir daftar satker yang mengalami pagu minus agar melakukan percepatan revisi anggaran ke Kanwil DjPb
4. Berkoordinasi dengan pihak Bank Himbara dalam membahas mengenai permasalahan dan kendala serta untuk merumuskan strategi yang tepat dalam percepatan penggunaan KKP pemerintah dan implementasi Digipay

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Permasalahan umum belanja yang diidentifikasi pada Wilayah KPPN Solok antara lain:

1. Proses pengadaan barang yaitu : Keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kegagalan lelang, ketiadaan barang dalam sistem e-katalog LKPP.
2. Kendala perencanaan : Masih ada blokir pagu, penyusunan alokasi anggaran terlalu top down, pagu minus, pelaksanaan kegiatan tidak memperhatikan Rencana Penarikan Dana yang tercantum dalam Halaman III DIPA.
3. Kendala Kepatuhan thd Regulasi : Kesalahan SPM seperti data supplier yang belum terdaftar di SPAN, perubahan data supplier yang tidak dilaporkan, yang menunjukkan masih rendahnya komitmen pejabat pengelola keuangan terhadap ketentuan terkait pelaksanaan anggaran
4. Permasalahan terkait koordinasi internal dan eksternal, yakni keterlambatan penyampaian bukti pengeluaran kepada bendahara pengeluaran, kurangnya koordinasi antar pejabat perbendaharaan, pejabat perbendaharaan mutasi, cuti, atau melakukan perjalanan dinas selama proses tagihan, dan petugas baru belum menguasai tisi dan peraturan terkait

ASPEK KHUSUS



Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1. Kesalahan SPM yang terjadi di KPPN Solok mayoritas karena kesalahan supplier yang menunjukkan kurangnya pemahaman para pengelola keuangan dalam pengelolaan data supplier pada SPAN.
2. Pagu minus Belanja Pegawai (51) dan Belanja Barang (52) yang terjadi pada banyak satuan kerja lebih disebabkan perencanaan dalam penyusunan kebutuhan belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) di tahun sebelumnya tidak mempertimbangkan banyak hal, seperti pada belanja pegawai, tidak memperhitungkan penambahan pegawai, baik pindahan atau pegawai baru termasuk adanya jabatan baru yang membutuhkan tunjangan jabatan. Sedangkan untuk belanja barang, pagu minus terjadi karena tidak ada koordinasi antara satker dan eselon I pusat satker dalam melakukan revisi/realokasi anggaran.
3. Nilai Perencanaan Kas pada KPPN Solok lebih disebabkan oleh pengaturan minimal pengeluaran yang harus diajukan Penencanaan Kas dengan nilai minimal Rp 5 Miliar.
4. Untuk nilai penyelesaian tagihan, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya dokumen administratif pada satuan kerja sehingga terlambat dalam pengajuan tagihan ke KPPN Solok.

Pemulihan Ekonomi Nasional

1. Untuk kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui suau kerja KPPN Solok selaku pengelola penyaluran DFDD dengan pagu Rp 350,5 M, realisasi sebesar Rp 320,9 M, atau secara prosentase penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2021 adalah 91,55%, dengan rincian realisasi penyaluran Dana Desa sudah mencapai 100% pada Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran DAK Fisik pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan hanya mencapai 83,10%

Akun Covid-19

Akun COVID-19 yang ada pada satuan kerja lingkup KPPN Solok terdiri dari dua akun yaitu 521131 (Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19) dan 521241 (Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19). Sepanjang tahun tahun 2021, realisasi akun 521131 adalah sebesar Rp0,51 miliar dari Rp0,53 miliar atau mencapai 96,81% dan akun 521241 sebesar Rp2,28 miliar dari Rp2,32 miliar atau mencapai 98,54%

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

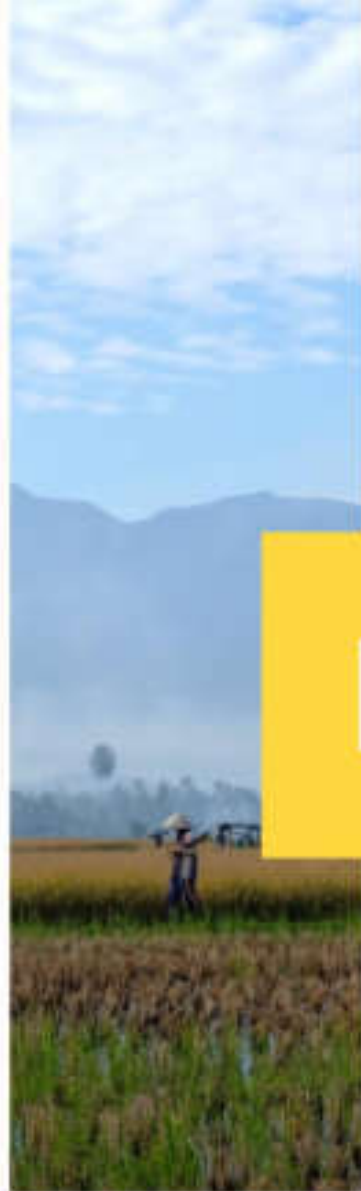
Capaian IKPA sebesar 97,04 secara umum menunjukkan kinerja yang baik karena menunjukkan tren peningkatan dibanding capaian di periode yang sama di tahun 2021. Beberapa permasalahan antara lain

Permasalahan umum

- (1) Retur SP2D, penyebabnya perubahan supplier satker yang belum dilaporkan ke KPPN
- (2) Penyampaian RPD Harian oleh satker dengan nilai minimal Rp 5 M. Kondisi satker lingkup KPPN Solok secara transaksi tidak ada yang mencapai Rp 5 M, kecuali transaksi penyaluran DFDD
- (3) Penyelesaian tagihan, terjadi karena satker terlambat dalam melengkapi dokumen tagihan yang akhirnya berpengaruh pada keterlambatan penyelesaian tagihan satker ke pihak ketiga
- (4) Pagu Minus, terjadi karena Pagu minus Belanja Pegawai (51) dan Belanja Barang (52) yang terjadi pada banyak satuan kerja lebih disebabkan perencanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) di tahun sebelumnya dan tidak ada koordinasi antara satker dan eselon I pusat satker dalam melakukan revisi/realokasi anggaran

Permasalahan khusus

- (1) Pengimplementasian KKP dan Digipay belum maksimal karena keterbatasan penyedia barang yang memiliki EDC dan bergabung dengan Digipay



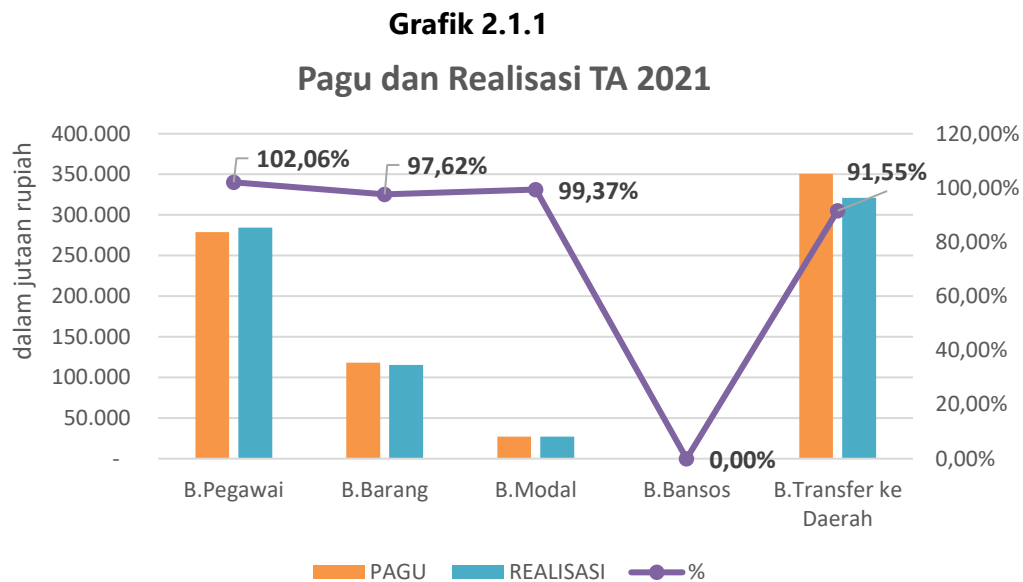
BAB 2

DATA BELANJA K/L

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021

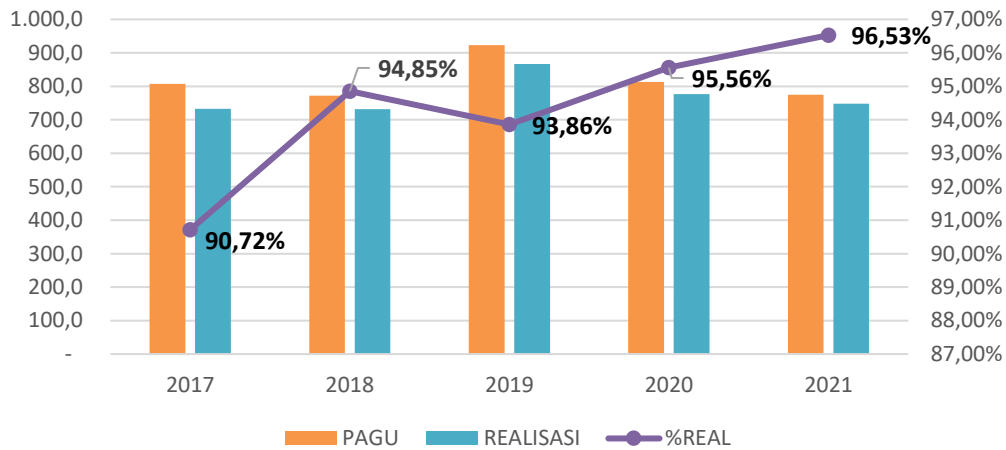
2.1 Total Pagu dan Realisasi Belanja K/L

Alokasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Solok pada tahun 2021 adalah sebesar Rp774,7 miliar yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp424,2 miliar dan belanja TKDD sebesar Rp350,5 miliar. Belanja K/L terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, untuk Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2021 tidak dianggarkan, tetapi sudah termasuk dalam pada Belanja Transfer ke Daerah pada penyaluran DFDD sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.2.1.



Tren realisasi anggaran selama lima tahun terakhir (2017 – 2021) secara umum mengalami kenaikan, kecuali pada periode tahun 2019, mengalami penurunan realisasi karena meningkatnya pagu APBN karena adanya pelaksanaan Pemilihan Umum. Data tren pagu dan penyerapan anggaran sebagaimana pada Grafik 2.2.2.

Grafik 2.1.2

Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran
TA 2017 - 2021

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2 Pagu dan Realisasi Kumulatif

2.2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja

Berdasarkan klasifikasi jenis belanja, KPPN Solok mendapatkan alokasi dana APBN yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Transfer ke Daerah (DAK Fisik dan Dana Desa). Secara prosentase, pagu anggaran belanja pusat (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) sebesar 54,75% dengan realisasi 57,09% dan Belanja Transfer ke Daerah (DAK Fisik dan Dana Desa) sebesar 42,25% dengan realisasi 42,91%.

Tabel 2.2.1.1
Pagu dan Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2021

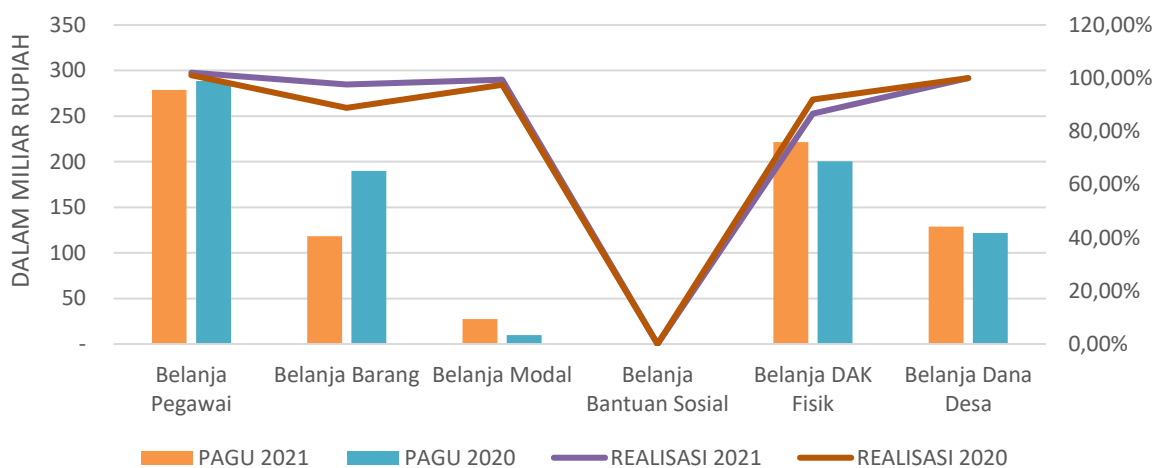
NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	REALISASI %	SISA
1	Belanja Pegawai	278.693.621.000	284.446.682.802	102,06%	-5.753.061.802
2	Belanja Barang	118.162.856.000	115.350.843.726	97,62%	2.812.012.274
3	Belanja Modal	27.321.326.000	27.150.202.258	99,37%	171.123.742
4	Belanja DAK Fisik	221.600.248.000	191.978.439.556	86,63%	29.621.808.444
5	Belanja Dana Desa	128.945.691.000	128.945.691.000	100,00%	0
TOTAL		774.723.742.000	747.871.859.342		26.851.882.658

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Pagu anggaran tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp26,85 miliar atau 3,47% jika dibandingkan tahun 2020. Alokasi anggaran untuk belanja bantuan sosial, sudah tidak ada pada APBN 2021, akan tetapi alokasi anggaran belanja DAK Fisik dan Dana Desa mengalami kenaikan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja bantuan sosial sudah dimasukkan pada belanja belanja DAK Fisik dan Dana Desa dimana terdapat alokasi bantuan sosial kepada masyarakat.

Grafik 1.2.1.1

**Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tahun 2020 dan 2021**



Apabila dilihat dari perkembangan realisasi atas pagu anggaran menunjukkan kenaikan dalam 2 tahun terakhir, hanya belanja DAK Fisik yang mengalami penurunan sebesar 5,34%. Dari data diatas tren kenaikan realisasi menggambarkan bahwa dana APBN dapat tersalurkan secara maksimal walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal ini penting untuk menunjukkan pemerintah hadir dalam masa pandemi COVID-19 dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah dalam wilayah kerja KPPN Solok.

Tabel 2.2.1.2
Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja

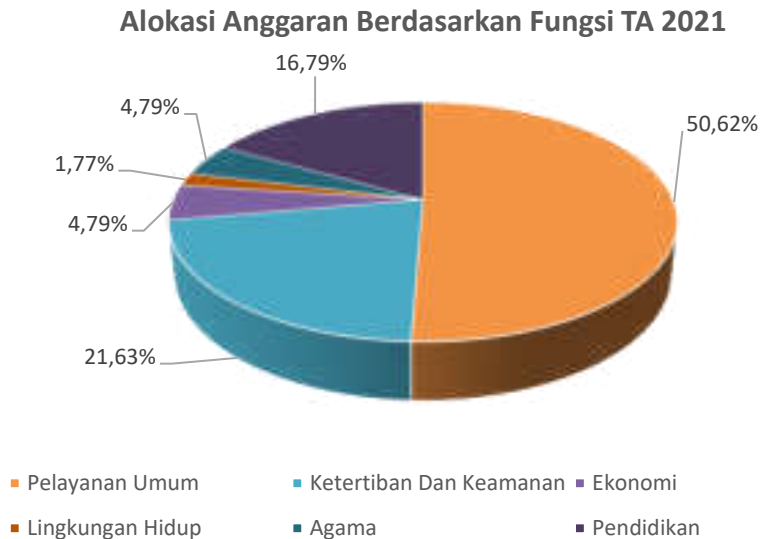
NO	JENIS BELANJA	PAGU		% REALISASI		% NAIK/TURUN
		2021	2020	2021	2020	
1	Belanja Pegawai	278.693.621.000	288.609.217.000	102,06%	101,10%	0,97%
2	Belanja Barang	118.162.856.000	189.922.679.000	97,62%	88,84%	8,78%
3	Belanja Modal	27.321.326.000	9.875.250.000	99,37%	97,47%	1,90%
4	Belanja Bansos	-	215.000.000	0,00%	0,00%	0,00%
5	Belanja DAK Fisik	221.600.248.000	200.576.120.000	86,63%	91,98%	-5,34%
6	Belanja Dana Desa	128.945.691.000	121.842.837.000	100,00%	100,00%	0,00%
TOTAL		774.723.742.000	811.041.103.000			

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Fungsi

Alokasi belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh KPPN Solok tersebar pada 6 dari 11 klasifikasi fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi (01) Pelayanan Umum, (03) Ketertiban dan Keamanan, (04) Ekonomi, (05) Lingkungan Hidup, (09) Agama, dan (10) Pendidikan. Alokasi pagu untuk fungsi pelayanan umum merupakan alokasi terbesar dimana memegang proporsi 50,62% dari total pagu anggaran. Alokasi pagu terbesar selanjutnya berada di fungsi ketertiban dan keamanan (21,63% dari total pagu) dan fungsi Pendidikan (16,79% dari total pagu).

Grafik 2.2.2.1



Sumber: *ditpa.kemenkeu.go.id*

Sampai dengan akhir tahun 2021, semua fungsi sudah terealisasi di atas target penyerapan Triwulan IV yaitu 95% dimana fungsi dengan realisasi terbesar berada pada fungsi Pendidikan sebesar 104,83 % kemudian disusul realisasi fungsi Agama sebesar 99,80%. Realisasi pada fungsi Agama sebagian besar berasal dari realisasi belanja pegawai pada Kementerian Agama. Sedangkan kontribusi ketidakserapan anggaran terbesar berasal dari fungsi pelayanan umum sebesar 92,16%. Tingkat ketidakserapan ini berasal dari belum maksimalnya realisasi anggaran DAK Fisik dan Dana Desa yang dikelola oleh KPPN Solok sebagai pengelola penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, khususnya pada penyaluran DAK Fisik. Penyebab dari rendahnya penyerapan DAK Fisik tahun 2021 Khusus DAK Fisik, realisasi yang kurang optimal disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dalam DAK Fisik yang belum bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19, pergeseran alokasi anggaran di daerah, dan batas waktu penyaluran yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan penyaluran dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2.2.1
Pagu dan Penyerapan Anggaran per Fungsi Tahun 2021

NO	FUNGSI	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA	UNDISB
1	Pelayanan Umum	392.149.582.000	361.416.162.964	92,16%	30.733.419.036	114,46%
2	Ketertiban Dan Keamanan	167.555.847.000	165.857.573.571	98,99%	1.698.273.429	6,32%
3	Ekonomi	37.120.980.000	36.790.385.642	99,11%	330.594.358	1,23%
4	Lingkungan Hidup	13.696.432.000	13.396.797.867	97,81%	299.634.133	1,12%
5	Agama	34.161.378.000	34.092.514.022	99,80%	68.863.978	0,26%
6	Pendidikan	130.039.523.000	136.318.425.276	104,83%	-6.278.902.276	-23,38%
TOTAL		774.723.742.000	747.871.859.342		26.851.882.658	

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Kewenangan

Alokasi anggaran tahun 2021 pada satuan kerja lingkup KPPN hanya terdiri dari dua kewenangan yaitu Kantor Daerah (KD) dan Desentralisasi (DS). Alokasi untuk kewenangan Kantor Daerah mendominasi satuan kerja lingkup KPPN Solok, dari 66 satuan kerja, 65 satuan kerja dengan kewenangan KD, sedangkan kewenangan DS hanya 1 satuan kerja yaitu KPPN Solok sebagai penyalur DFDD. Kewenangan KD mempunyai alokasi anggaran 424,18 miliar dengan realisasi Rp426,95 miliar dan alokasi pada kewenangan DS Rp350,55 miliar dengan realisasi sebesar Rp320,92 miliar.

Tabel 2.2.3.1
Pagu dan Penyerapan Anggaran per Kewenangan Tahun 2021

NO	KEWENANGAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA
1	Kantor Daerah	424.177.803.000	426.947.728.786	100,65%	(2.769.925.786)
2	Desentralisasi	350.545.939.000	320.924.130.556	91,55%	29.621.808.444
TOTAL		774.723.742.000	747.871.859.342		26.851.882.658

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Secara total alokasi, terdapat penurunan pada pagu anggaran tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp36,32 miliar, dimana pada tahun 2020 terbagi menjadi 3 kewenangan yaitu KD, TP, dan DS dan tahun 2021 kewenangan TP sudah tidak ada alokasi anggaran. Apabila dilihat secara tren realisasi anggaran, terdapat kenaikan prosentase pada kewenangan KD di tahun 2021, sedangkan kewenangan DS mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2020, walaupun secara pagu anggaran, kewenangan DS mengalami peningkatan alokasi. Penurunan realisasi DS berasal dari belanja DAK Fisik yang disebabkan oleh realisasi yang kurang optimal disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dalam DAK Fisik yang belum bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19, pergeseran alokasi anggaran di daerah, dan batas waktu penyaluran yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan penyaluran dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

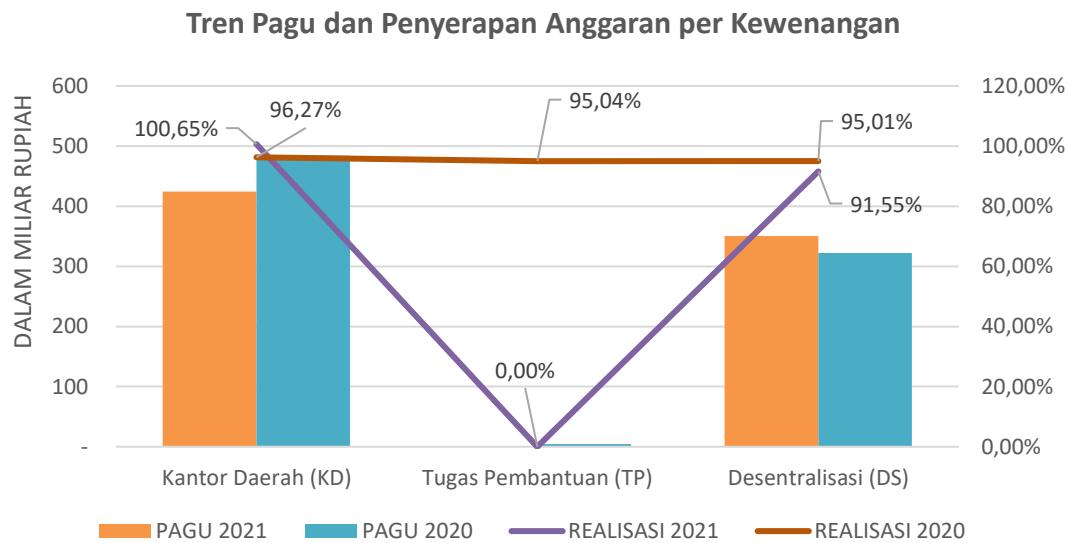
Tabel 2.2.3.2
Tren Pagu dan Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU		% REALISASI		% NAIK/ TURUN
		2021	2020	2021	2020	
1	Kantor Daerah (KD)	424.177.803.000	484.206.196.000	100,65%	96,27%	4,38%
2	Tugas Pembantuan (TP)	-	4.415.950.000	0,00%	95,04%	-95,04%

3	Desentralisasi (DS)	350.545.939.000	322.418.957.000	91,55%	95,01%	-3,46%
TOTAL		774.723.742.000	811.041.103.000			

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Grafik 2.2.3.1



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

2.2.4 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Sumber Dana

Berdasarkan klasifikasi sumber dana, alokasi anggaran satuan kerja lingkup KPPN Solok terbagi menjadi 4 sumber dana, yaitu Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Alokasi terbesar bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp753,15 miliar atau 97,22% dan terkecil bersumber dari SBSN sebesar Rp2,92 miliar atau 0,38% dari total pagu anggaran.

Tabel 2.2.4.1
Pagu dan Penyerapan Anggaran per Kewenangan Tahun 2021

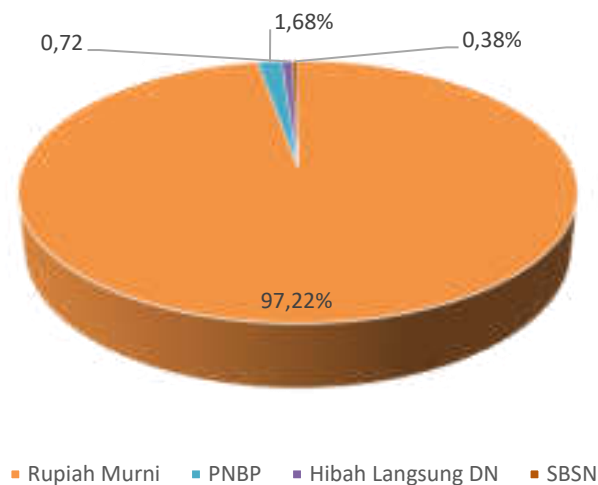
NO	KEWENANGAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA
1	Rupiah Murni	753.148.308.000	726.721.133.853	96,49%	26.427.174.147
2	PNBP	13.050.451.000	12.630.706.233	96,78%	419.744.767

3	Hibah Langsung DN	5.604.983.000	5.603.833.041	99,98%	1.149.959
4	SBSN	2.920.000.000	2.916.186.215	99,87%	3.813.785
TOTAL		774.723.742.000	747.871.859.342		26.851.882.658

Sumber: *ditpa.kemenkeu.go.id*

Grafik 2.2.4.1

Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana TA 2021



Sumber: *ditpa.kemenkeu.go.id*

2.2.5 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Klasifikasi Organisasi

Pada tahun 2021, anggaran belanja K/L untuk wilayah kerja KPPN Solok adalah sebesar Rp774,7 miliar yang tersebar pada 12 Kementerian/Lembaga dengan total 66 DIPA satker. Kementerian yang memiliki pagu tertinggi adalah KPPN Solok sebagai Bendahara Umum Negara dengan alokasi sebesar Rp350,5 miliar atau 45,25% dari total seluruh DIPA K/L kemudian diikuti oleh Kementerian Agama dengan pagu Rp164,2 miliar atau 21,19% dan Kepolisian Negara RI dengan pagu Rp119,2 miliar atau 15,39% dari total seluruh DIPA K/L.

Bendahara Umum Negara dalam hal ini adalah KPPN sebagai penyalur DFDD, memegang peranan penting dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. DFDD dapat digunakan sebagai sebuah stimulus kegiatan perekonomian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Kementerian Agama yang memegang

fungsi pendidikan, sehingga pagu ini sejalan dengan kebijakan belanja pemerintah di tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas SDM. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang pagu tertinggi ketiga. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi dari Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Selain itu, Polri pada tahun 2021, diberikan tugas tambahan sebagai Satgas COVID-19 yang memegang peranan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Data pada tabel 2.2.2 menunjukkan bahwa secara umum, penyerapan anggaran setiap K/L sudah mencapai target di atas 95,00%, bahkan ada yang melebihi 100,00% yaitu Kementerian Agama dengan realisasi 103,78%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pada satuan kerja lingkup Kementerian Agama terdapat pagu minus yang harus diselesaikan, khususnya pada Belanja Pegawai.

Tabel 2.2.5.1
Pagu dan Penyerapan Anggaran per K/L Tahun 2021

NO	ORGANISASI - K/L	PAGU	REALISASI	% REALISASI	SISA	UNDISB
1	Mahkamah Agung	18.261.993.000	17.679.484.393	96,81%	582.508.607	2,17%
2	Kejaksaan Republik Indonesia	14.398.920.000	14.067.571.924	97,70%	331.348.076	1,23%
3	Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri	14.132.669.000	13.880.332.866	98,21%	252.336.134	0,94%
4	Kementerian Keuangan	14.340.416.000	13.549.584.709	94,49%	790.831.291	2,95%
5	Kementerian Pertanian	37.120.980.000	36.790.385.642	99,11%	330.594.358	1,23%
6	Kementerian Agama	164.200.901.000	170.410.939.298	103,78%	-6.210.038.298	-23,13%

7	Badan Pusat Statistik	13.029.491.000	12.808.297.709	98,30%	221.193.291	0,82%
8	Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN	13.696.432.000	13.396.797.867	97,81%	299.634.133	1,12%
9	Kepolisian Negara Republik Indonesia	119.211.300.000	118.706.174.618	99,58%	505.125.382	1,88%
10	Badan Narkotika Nasional (BNN)	1.550.965.000	1.524.009.770	98,26%	26.955.230	0,10%
11	Komisi Pemilihan Umum	14.233.736.000	14.134.149.990	99,30%	99.586.010	0,37%
12	Bendahara Umum Negara	350.545.939.000	320.924.130.556	91,55%	29.621.808.444	110,32%
TOTAL		774.723.742.000	747.871.859.342		26.851.882.658	

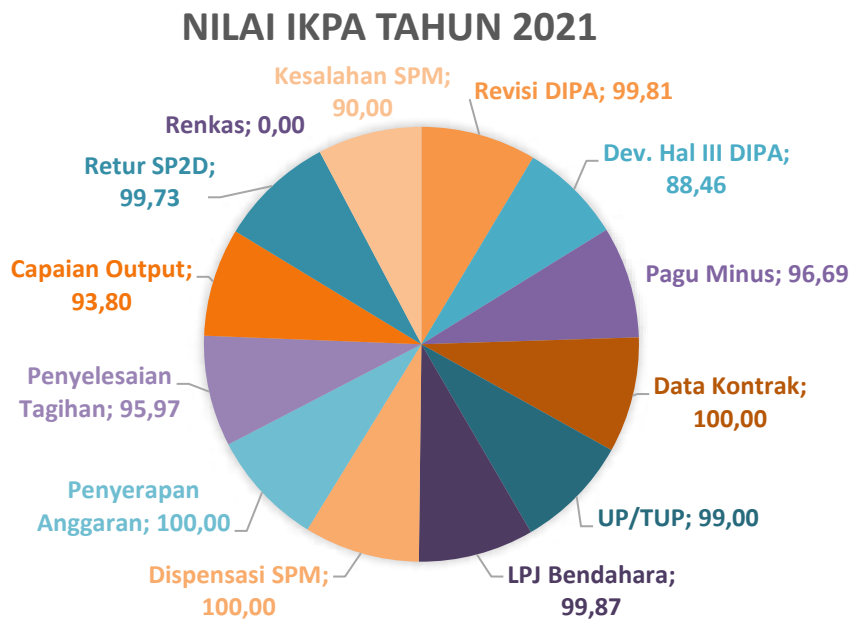
Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Apabila dilihat dari ketidakterserapan anggaran (*undisturbed*), K/L Bendahara Umum Negara menduduki peringkat pertama di tahun 2021. Dari data di atas, prosentase pada satuan kerja Bendahara Umum Negara dalam hal ini KPPN sebagai penyalur DFDD menunjukkan bahwa masih ada sisa dana Rp29,6 miliar atau 110,32% sisa dana tidak terserap dari total Rp26,9 miliar, termasuk perhitungan minus Rp6,2 miliar pada Kementerian Agama. Untuk K/L lainnya, prosentase ketidakterserapan anggaran (*undisturbed*) rata-rata di bawah 2,00% yang berarti sudah mencapai target walaupun pada masa pandemi COVID-19.

2.3 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2021

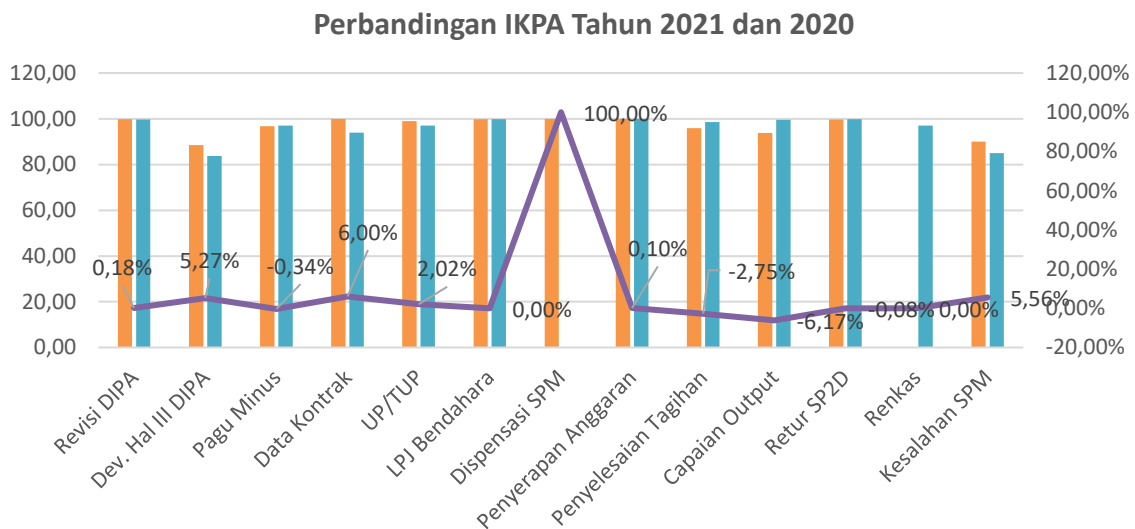
Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terdiri dari 13 indikator penilaian untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan anggaran pada periode tertentu. Untuk periode tahun 2021, KPPN Solok mendapatkan nilai total 97,04. Penilaian ini mengalami kenaikan dibandingkan periode tahun 2020 dengan nilai 91,74.

Grafik 2.3.1



Sumber: spanint.kemenkeu.go.id

Grafik 2.3.2



Sumber: *spanint.kemenkeu.go.id*

Data pada grafik 2.3.2 menunjukkan perbandingan nilai IKPA tahun 2021 dan 2020. Walaupun secara total nilai mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2021, terdapat empat indikator yang mengalami penurunan sebagai berikut:

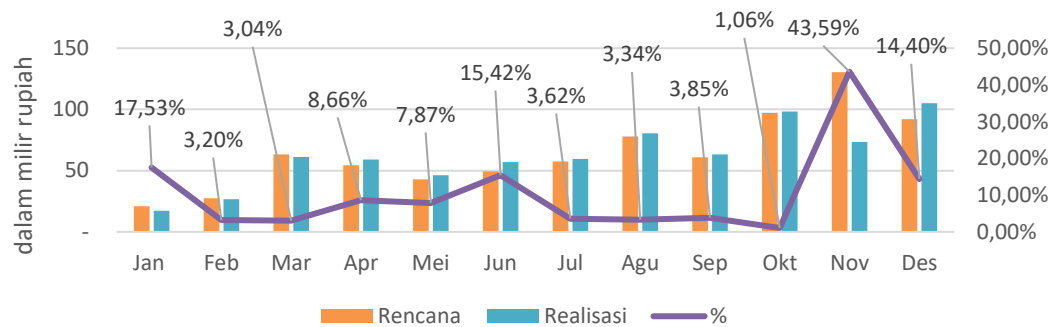
1. Retur SP2D
penyebabnya perubahan supplier satker yang belum dilaporkan ke KPPN
2. Perencanaan Kas
Penyampaian RPD Harian oleh satker dengan nilai minimal Rp 5 M. Kondisi satker lingkup KPPN Solok secara transaksi tidak ada yang mencapai Rp 5 M, kecuali transaksi penyaluran DFDD
3. Penyelesaian tagihan
Keterlambatan penyelesaian tagihan terjadi karena satker terlambat dalam melengkapi dokumen tagihan yang akhirnya berpengaruh pada keterlambatan penyelesaian tagihan satker ke pihak ketiga
4. Pagu Minus
Penyebab pagu minus, khususnya pada belanja pegawai (51) dan belanja barang (52) yang terjadi pada banyak satuan kerja lebih disebabkan perencanaan dalam penyusunan kebutuhan belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) di tahun sebelumnya tidak mempertimbangkan banyak hal, seperti pada belanja pegawai, tidak memperhitungkan penambahan pegawai, baik pindahan atau pegawai baru termasuk adanya jabatan baru yang membutuhkan tunjangan jabatan. Sedangkan untuk belanja barang, pagu minus terjadi karena tidak ada koordinasi antara satker, Kantor Wilayah, atau Eselon I pusat satker dalam melakukan revisi/ realokasi.

2.4 Halaman III DIPA dan Realisasi Bulanan Tahun 2021

Pergerakan realisasi atas rencana penarikan anggaran pada Halaman III DIPA masih fluktuatif sepanjang tahun 2021. Masih kurang tepatnya satuan kerja dalam melakukan perencanaan menjadi sebab utama deviasi antara rencana dan realisasi anggaran.

Grafik 2.4.1

Halaman III DIPA, Realisasi dan Deviasi Bulanan Tahun 2021



Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id

Selain perencanaan, kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sepanjang tahun 2021, menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, khususnya kegiatan pertemuan tatap muka, sosialisasi yang melibatkan banyak orang, kegiatan siswa di sekolah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut dibatasi atau bahkan belum boleh dilakukan selama aturan PPKM diberlakukan. Deviasi tertinggi adalah sebesar 43,59% atau Rp56,79 miliar pada bulan November 2021. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp56,43 miliar atau 99,36% disumbangkan oleh satuan kerja KPPN sebagai penyalur DAK Fisik dan Dana Desa. Realisasi yang kurang optimal adalah realisasi belanja DAK Fisik, sedangkan penyaluran Dana Desa sudah tersalur 100%. Kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dalam DAK Fisik yang belum bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19, pergeseran alokasi anggaran di daerah, dan batas waktu penyaluran yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan penyaluran dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Tabel 2.4.1
Halaman III DIPA, Realisasi dan Deviasi Bulanan Tahun 2021

NO	BULAN	RENCANA	REALISASI	DEVIASI	% DEVIASI
1	Jan	21.005.253.566	17.323.825.255	3.681.428.311	17,53%
2	Feb	27.455.598.024	26.576.831.825	878.766.199	3,20%
3	Mar	63.214.557.617	61.292.004.426	1.922.553.191	3,04%
4	Apr	54.365.504.797	59.074.148.203	4.708.643.406	8,66%
5	Mei	42.783.538.293	46.150.687.121	3.367.148.828	7,87%
6	Jun	49.472.079.181	57.100.812.809	7.628.733.628	15,42%
7	Jul	57.478.632.324	59.558.611.392	2.079.979.068	3,62%
8	Agu	77.798.623.075	80.397.068.616	2.598.445.541	3,34%
9	Sep	61.028.175.647	63.378.169.956	2.349.994.309	3,85%
10	Okt	97.290.905.506	98.326.103.032	1.035.197.526	1,06%
11	Nov	130.294.185.625	73.494.326.466	56.799.859.159	43,59%
12	Des	91.958.222.696	105.199.270.241	13.241.047.545	14,40%
TOTAL		774.145.276.351	747.871.859.342		

Sumber: ditpa.kemenkeu.go.id



BAB 3

PERMASALAHAN SEMESTER II TA 2021

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021

1. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah yang Belum Optimal

1.1 Rumusan Masalah

Implementasi pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bertujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi *idle cash* dalam penggunaan uang persediaan. Efektif berlaku mulai 1 Juli 2019, penggunaan KKP tergolong sangat minim dari tahun ke tahun berdasarkan monitoring penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada mitra kerja KPPN Solok.

Untuk periode tahun 2021, dari 65 (enam puluh lima) satuan kerja lingkup KPPN Solok, hanya 23 (dua puluh tiga) satuan kerja yang Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP) dengan nominal Rp 643.100.000,-. Sampai dengan Semester II 2021 tercatat baru 4 (empat) satuan kerja yang merealisasikan Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (GUP KKP) atau 1,74% dari satuan kerja yang memiliki Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (UP KKP).

Tabel 3.1.1
UP KKP Satker Wilayah Kerja KPPN Solok

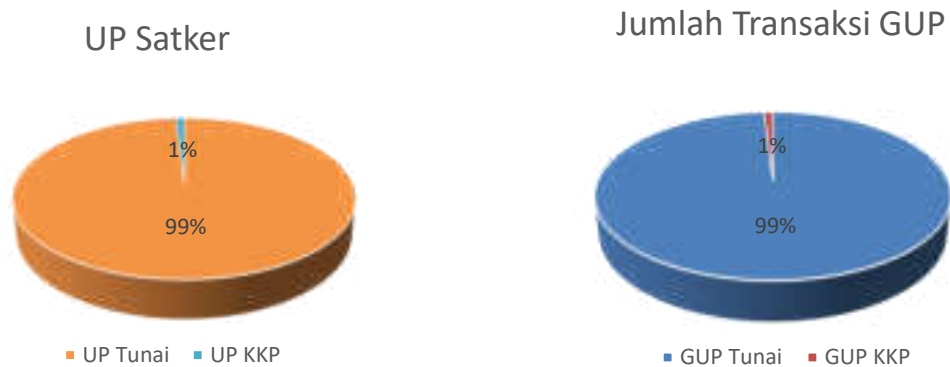
NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMINAL UP KKP
1	098785	PENGADILAN NEGERI SOLOK	7.500.000
2	400446	PENGADILAN NEGERI KOTOBARU	12.000.000
3	401990	PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH	16.000.000
4	673648	KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN	8.000.000
5	406137	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	20.000.000
6	527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	20.000.000
7	527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	20.000.000

8	412050	BALAI PENELITIAN TANAMAN BUAH TROPIKA SOLOK	50.000.000
9	567449	BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA BARAT	80.000.000
10	299563	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK	13.600.000
11	299565	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK	40.000.000
12	663955	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK SELATAN	10.000.000
13	019962	BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SOLOK	28.000.000
14	019979	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SOLOK	14.000.000
15	667193	BADAN PUSAT STATISTIK KAB. SOLOK SELATAN	16.000.000
16	401397	KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK	16.000.000
17	430875	KANTOR PERTANAHAN KAB. SOLOK	24.000.000
18	666362	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK SELATAN DI PROPINSI SUMATERA BARAT	28.000.000
19	640778	POLRES SOLOK	60.000.000
20	665218	POLRES SOLOK SELATAN	50.000.000
21	665988	POLRES SOLOK KOTA	60.000.000
22	418309	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SOLOK	40.000.000
23	656219	KPU KOTA S O L O K	10.000.000
TOTAL			643.100.000

Sampai dengan periode Semester II 2021, realisasi anggaran dengan mekanisme Penggantian Uang Persediaan (GUP) pada KPPN Solok mencapai total Rp 67.161.512.780,- yang terdiri atas 3131 transaksi GUP. Namun apabila dirinci secara detail, terjadi ketimpangan yang cukup besar dalam mekanisme transaksi Penggantian Uang Persediaan Tunai (GUP Tunai) dan Penggantian Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah (GUP KKP) dengan perbandingan 3101 transaksi GUP Tunai dibandingkan 30 transaksi GUP KKP serta

dalam perhitungan persentase 99,04% berbanding 0,96%.

Grafik 3.1.1
Data UP/GUP



1.2 Penyebab

- Pola perilaku satuan kerja yang masih lebih memilih sistem konvensional (belanja manual)
- Pemahaman bank yang belum merata dan minimnya sosialisasi pihak perbankan dengan penyedia barang/jasa terkait dengan penggunaan KKP
- Ketersediaan merchant/toko yang menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sangat terbatas

1.3 Keterjadian

Melihat kondisi geografis wilayah kerja KPPN Solok, ketersediaan *merchant*/toko yang menyediakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) sangat terbatas merupakan hal yang biasa sehingga menjadi salah satu penyebab minimnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah oleh banyak Kementerian/Lembaga atau satuan kerja. Faktor utama yang paling memengaruhi adalah pola perilaku satuan kerja yang masih lebih memilih sistem konvensional. Perilaku dari satuan kerja yang lebih tertarik dalam bertransaksi secara tunai dikarenakan lebih sederhana dan perputaran modal yang lebih cepat. Berdasarkan data pemakaian KKP satker mitra KPPN Solok, transaksi yang menggunakan KKP merupakan transaksi yang pembayarannya mewajibkan penggunaan kartu kredit dan tidak dapat menggunakan opsi pembayaran lain, seperti langganan *zoom meeting*. Faktor lainnya adalah pemahaman bank yang belum merata dan minimnya sosialisasi pihak perbankan dengan penyedia barang/jasa terkait dengan penggunaan KKP.

Keterjadian hal yang bersifat teknis dan administrasi seperti mekanisme penggantian pejabat pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perlu adanya koordinasi pada pihak perbankan terkait hal ini, karena dimasa mendatang tentunya berpotensi terjadi penggantian pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Seperti ketika terjadi penggantian pejabat pemegang Kartu Kredit Pemerintah (penggantian bendahara) satuan kerja, satuan kerja mengajukan perubahan namun pihak perbankan di daerah tidak memahami mekanisme penggantian sehingga diarahkan untuk konsultasi ke pusat melalui *contact center* yang tersedia. Tentunya hal ini juga memberikan pengaruh perlambatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh satuan kerja.

Selain itu, ketersediaan *merchant*/toko yang menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) sangat terbatas. Jenis kegiatan belanja barang operasional satuan kerja yang sederhana dan jenis barang yang dibutuhkan oleh satker banyak tersedia di daerah juga turut mengurangi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Berdasarkan hal ini, dapat dilihat satuan kerja cenderung menggunakan pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam kondisi tidak terdapat pilihan lain dan menjadi alternatif terakhir.

1.4 Penyelesaian Masalah

- a) Komunikasi dan edukasi terhadap satuan kerja terkait dengan penggunaan KKP.
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dalam hal penyediaan mesin EDC penyeragaman pemahaman terkait KKP.
- c) Penyamaan persepsi terkait KKP seperti penanganan hal-hal bersifat teknis dan administratif seperti mekanisme perubahan pemegang KKP serta perubahan limit KKP oleh satuan kerja, sehingga ke depannya tidak menghambat realisasi anggaran.

1.5 Hasil

Permasalahan minimnya penggunaan KKP oleh satuan kerja selalu berpotensi terjadi sepanjang periode apabila melihat letak geografis wilayah kerja KPPN Solok serta karakteristik jenis kegiatan belanja satuan kerja. Namun, KPPN Solok berkomitmen untuk terus mendorong satuan kerja dalam memaksimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tidak hanya untuk transaksi yang bersifat online atau pilihan transaksi terakhir namun juga untuk transaksi secara langsung pada toko/ gerai yang menyediakan EDC

(*Electronic Data Capture*).

Terkait dengan penyediaan mesin EDC, pihak perbankan mendukung dan terus berkomitmen untuk memperbanyak jumlah EDC, pada *merchant*/toko di wilayah mitra KPPN Solok dan mensosialisasikan pada *merchant*/toko terkait kemudahan penggunaan EDC. Permasalahan yang mungkin masih berulang adalah terkait dengan karakteristik *merchant*/toko yang lebih memilih pembayaran secara tunai karena perputaran modal yang lebih cepat, terutama melihat kemampuan dan aktifitas ekonomi di wilayah Solok.

Meskipun permasalahan penggunaan KKP yang belum optimal selalu terjadi secara berulang setiap semester, KPPN Solok memiliki target peningkatan transaksi penggunaan KKP satuan kerja setiap semester. KPPN Solok terus mengupayakan koordinasi dan edukasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini satuan kerja dan Perbankan.

2. Implementasi Digital Payment(Digipay) yang Belum Optimal

1.1 Rumusan Masalah

Digitalisasi pengelolaan kas negara merupakan hal yang mutlak dilakukan sebagai salah satu menghadapi perubahan dalam revolusi industri 4.0. Salah satu digitalisasi yang dilakukan oleh ditjen Perbendaharaan adalah *digital payment marketplace* (Digipay). Pengembangan Digipay merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran pemerintah, sebagai pelaksanaan fungsi penatausahaan pengeluaran negara khususnya dalam pengelolaan Uang Persediaan. Pengembangan Digipay mengintegrasikan proses pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporan dalam satu ekosistem sehingga terjadi simplifikasi sejak proses pengadaan hingga proses pertanggungjawaban. Selain itu, pengembangan Digipay akan mendukung penggunaan kartu kredit pemerintah dan CMS *virtual account* dalam pembayaran belanja pemerintah.

Alur Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa melalui Digipay



1.2 Penyebab

- a) Terbiasa dengan transaksi konvensional (belanja manual) yang lebih mudah dan nyaman untuk diterapkan oleh vendor dan satuan kerja.

Digipay mendigitalisasi proses pengadaan barang/jasa, pembayaran transaksi, dan perpajakan. Alur tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tetapi seluruh prosesnya dilakukan secara digital. Hal ini juga dapat dilihat dari pengaturan Digipay dalam mengatur role user pengguna, mulai dari pemesan barang, PPK, Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran dan penerima barang. Pemisahan kewenangan tersebut juga mengatur role user Digipay yang boleh dirangkap atau tidak oleh para pejabat perbendaharaan. Adapun role user yang tidak boleh dirangkap adalah PPK, Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran, sehingga tetap menciptakan proses *check and balance* dalam proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui Digipay

- b) Terbatasnya vendor yang bergabung dengan Digipay
- c) SDM satuan kerja masih kurang dalam memahami pengoperasian aplikasi Digipay
- d) Jaringan internet yang kurang stabil

1.3 Keterjadian

Sampai dengan Desember 2021, satuan kerja yang sudah bergabung dengan Digipay sebanyak tujuh belas satuan kerja atau 26,15 persen dari total satuan kerja dalam

wilayah kerja KPPN Solok. Data ini sedikit lagi mencapai target yang ditetapkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara yaitu 30 persen dari jumlah Satker dalam wilayah kerja KPPN. Jumlah Satker yang telah bergabung dengan Digipay dan jumlah transaksi sebagaimana data pada Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3.2.1
Peserta Digipay Wilayah Kerja KPPN Solok

NO	WILAYAH	TOTAL SATKER	BERGABUNG DENGAN DIGIPAY			
			SATKER	VENDOR	TRANSAKSI	NOMINAL (RP)
1	Kota Solok	17	8	1	3	833.815
2	Kab. Solok	28	3	2	4	3.508.000
3	Kab. Solok Selatan	20	6	-	-	-
Total		65	17	3	7	4.341.815

Tabel 3.2.2
Satker Peserta Digipay Wilayah Kerja KPPN Solok

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	WILAYAH KERJA
1	299744	Kantor Kementerian Agama Kota Solok	Kota Solok
2	299743	Kantor Kementerian Agama Kota Solok	
3	299742	Kantor Kementerian Agama Kota Solok	
4	019962	Badan Pusat Statistik Kota Solok	
5	099208	Pengadilan Negeri Solok	
6	098785	Pengadilan Negeri Solok	
7	299741	Kantor Kementerian Agama Kota Solok	
8	525212	KPP Pratama Solok	

9	567449	BPTP Sumatera Barat	Kab. Solok
10	418309	BNN Kabupaten Solok	
11	527819	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Solok	
12	663953	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	Kab. Solok Selatan
13	663954	Kantor Kementerian Agama Kab.Solok Selatan	
14	663956	Kantor Kementerian Agama Kab.Solok Selatan	
15	666362	Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan	
16	663955	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan	
17	667193	BPS Kabupaten Solok Selatan	

Tabel 3.2.3
Transaksi Digipay

NO	NAMA SATKER	TRANSAKSI DIGIPAY			
		NAMA VENDOR	JENIS BARANG/JASA	TANGGAL TRANSAKSI	NOMINAL (RP)
1	KPPN Solok	Jaya Stationery	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	23 November 2020	288.000
		Jaya Stationery	Barang Konsumsi	09 Agustus 2021	220.000
		CV. Printamans	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	19 Agustus 2021	700.000
		CV. Printamans	Barang ATK, Peralatan dan Mesin	November 2021	2.300.000

2	KPP Pratama Solok	Jaya Stationery	Barang Konsumsi	30 Desember 2021	150.000
		Apotek Kimia Farma Solok	Jasa Lainnya	30 Desember 2021	208.515
		Apotek Kimia Farma Solok	Jasa Lainnya	30 Desember 2021	475.300
TOTAL					4.341.815

Progres implementasi Satker yang telah bertransaksi melalui Digipay dalam wilayah kerja KPPN Solok masih sangat rendah, yaitu dua satuan kerja dari enam puluh lima Satker atau 3,07 persen yang sudah melakukan transaksi menggunakan Digipay dari tujuh transaksi dengan nominal Rp4.341.815,- sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi KPPN untuk mencari tahu apa saja hambatan Satker dalam implementasi Digipay sekaligus mencari strategi yang tepat dalam upaya percepatan implementasi Digipay dalam wilayah kerja KPPN.

Hambatan utama dalam penggunaan Digipay ini adalah kebiasaan Satker untuk belanja manual. Ini berarti KPPN bisa fokus dalam melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis untuk merubah *mindset* Satker dan vendor dari belanja manual menjadi digital dan *sharing* pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan Satker dalam menggunakan Digipay. Selanjutnya, vendor yang belum menggunakan Digipay serta tidak ada petugas yang berkompeten dalam menggunakan Digipay.

Dalam implementasi Digipay, vendor membutuhkan sumber daya manusia yang memahami pengoperasian aplikasi, sebagai admin, operator dan kurir. Sehingga penerapan sistem marketplace membutuhkan *effort* atau upaya lebih dari para penyedia barang/jasa. Kondisi vendor UMKM di wilayah Solok masih banyak terdapat keterbatasan, mulai dari keterbatasan kualitas pengetahuan sumber daya manusia hingga keterbatasan yang tidak memungkinkan untuk penambahan atau merekrut sumber daya yang lebih berkualitas. Selanjutnya, masalah jaringan internet yang belum merata. Walaupun bukan masalah utama, akan tetapi hambatan jaringan internet menjadi salah satu penyebab masih minimnya implementasi Digipay lingkup KPPN Solok.

1.4 Penyelesaian Masalah

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan terkait aplikasi Digipay
- b) Melakukan sosialisasi dengan satuan kerja terkait penerapan sistem Digipay
- c) Melakukan koordinasi dan pendekatan dengan vendor berdasarkan rekomendasi vendor yang sering bertransaksi dengan satuan kerja

1.5 Hasil

Untuk meningkatkan partisipasi Satker dalam implementasi Digipay, KPPN Solok senantiasa melakukan komunikasi dan edukasi kepada para Satker untuk bergabung dengan Digipay. Salah satu bentuk edukasi adalah KPPN Solok telah melakukan bimbingan teknis mengenai Digipay kepada Satker lingkup Kementerian Agama Kab. Solok Selatan bersama dengan BRI Cabang Solok Selatan pada tanggal 21 Desember 2021 di Aula Kantor Kementerian Agama Kab. Solok Selatan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk Bimbingan Teknis Aplikasi Digipay dalam rangka meningkatkan partisipasi Satker untuk bergabung dengan Digipay serta mengaktifkan CMS *Virtual Account* yang dilakukan oleh BRI kepada rekening Bendahara Pengeluaran.

3. Pagu Minus

1.1 Rumusan Masalah

Munculnya pagu minus belanja pegawai dikarenakan satuan kerja tidak memperhitungkan rencana kerja 2020 dibanding dengan kebutuhan pada penyusunan RKAKL 2021 di tahun 2020. Pagu minus Belanja Pegawai (51) tahun 2021 terjadi pada 30 (tiga puluh) satuan kerja dari 58 (lima puluh delapan) satuan kerja gaji di wilayah kerja KPPN Solok, secara persentase mencapai 51,72%. Selanjutnya untuk minus Belanja non Belanja Pegawai terdapat 3 (tujuh) satuan kerja dari 66 (enam puluh enam) satuan kerja atau sekitar 4,54% jumlah satuan kerja wilayah kerja KPPN Solok.

Tabel 3.3.1
Pagu Minus Satker Wilayah Kerja KPPN Solok

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	BELANJA PEGAWAI (51)	BELANJA BARANG (52)	TOTAL
1	006728	CABANG KEJAKSAAN NEGERI SOLOK DI ALAHAN PANJANG	(581.758.405)	(15.610.000)	(597.368.405)
2	299563	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK	(106.334.850)	-	106.334.850
3	299564	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK	(6.367.132)	-	(6.367.132)
4	299565	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK	(3.581.132.400)	-	(3.581.132.400)
5	299566	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLOK	(66.003.379)	-	(66.003.379)
6	663953	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLSEL	(46.248.600)	-	(46.248.600)
7	663954	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLSEL	(254.728.361)	-	(254.728.361)
8	663955	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. SOLSEL	(742.600.571)	-	(742.600.571)
9	299741	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK	(248.363.274)	-	(248.363.274)
10	299742	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK	(77.273.864)	-	(77.273.864)
11	299743	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK	(30.410.937)	-	(30.410.937)
12	525212	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SOLOK	(270.000)	-	(270.000)

13	406137	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	(496.980.523)	-	(496.980.523)
14	424911	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SOLOK KAB. SOLOK	(1.202.260.538)	-	(1.202.260.538)
15	309182	MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 SOLOK SELATAN	(89.573.890)	-	(89.573.890)
16	575879	MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 SOLOK	(792.361.097)	(538.500)	(792.899.597)
17	647970	MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 SOLOK	(214.045.174)	-	(214.045.174)
18	424101	MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA SOLOK	(289.064.270)	-	(289.064.270)
19	299606	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 SOLOK	(271.566.240)	-	(271.566.240)
20	552802	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SOLOK	(2.460.307.905)	-	(2.460.307.905)
21	424801	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 SOLSEL	(288.518.874)	-	(288.518.874)
22	574150	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 SOLOK	(7.848.000)	-	(7.848.000)
23	601770	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SOLOK	(268.644.754)	-	(268.644.754)
24	674291	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 SOLSEL	(25.744.128)	-	(25.744.128)
25	601784	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SOLOK	(266.153.187)	(16.739.950)	(282.893.137)
26	601791	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 5 SOLSEL	(110.148.060)	-	(110.148.060)
27	601763	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 SOLOK	(485.000)	-	(485.000)

28	676345	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 6 SOLSEL	(159.152.389)	-	(159.152.389)
29	661096	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 7 SOLOK	(2.729.100)	-	(2.729.100)
30	552996	MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI KOTA SOLOK	(1.300.814.440)	-	(1.300.814.440)
TOTAL			(13.987.889.342)	(32.888.450)	(14.020.777.792)

1.2 Penyebab

- a) Perencanaan dalam penyusunan kebutuhan belanja pegawai pada RKAKL tidak mempertimbangkan banyak hal.
- b) Kurangnya koordinasi satuan kerja dengan vertikal (Eselon I) berkaitan dengan pelaksanaan revisi DIPA.

1.3 Keterjadian

Pagu minus Belanja Pegawai (51) tahun 2021 terjadi pada 30 (tiga puluh) satuan kerja dari 58 (lima puluh delapan) satuan kerja gaji di wilayah kerja KPPN Solok, secara persentase mencapai 51,72%. Selanjutnya untuk minus Belanja non Belanja Pegawai terdapat 3 (tujuh) satuan kerja dari 66 (enam puluh enam) satuan kerja atau sekitar 4,54% jumlah satuan kerja wilayah kerja KPPN Solok.

Pagu minus Belanja Pegawai (51) yang terjadi pada banyak satuan kerja lebih disebabkan perencanaan dalam penyusunan kebutuhan belanja pegawai pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) di tahun sebelumnya tidak mempertimbangkan banyak hal, seperti kemungkinan penambahan pegawai, baik pindahan atau pegawai baru termasuk adanya jabatan baru yang membutuhkan tunjangan jabatan.

Terkait dengan pagu Belanja Barang (52) yang mengalami minus lebih disebabkan kurangnya koordinasi satuan kerja dengan vertikal (Eselon I) berkaitan dengan

pelaksanaan revisi DIPA. Informasi realisasi anggaran satuan kerja tidak tersampaikan secara detail dan up to date menjadikan vertikal (Eselon I) melakukan revisi atas data yang mengakibatkan pagu minus karena pemotongan atau pengurangan atas akun belanja yang telah ada realisasi anggaran.

1.4 Penyelesaian Masalah

Berkaitan dengan pagu minus Belanja Pegawai (51), KPPN Solok telah menghimbau satuan kerja untuk melakukan perhitungan kembali potensi realisasi hingga akhir tahun anggaran 2021 serta melakukan revisi pagu minus Belanja Pegawai (51) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan pagu minus Belanja Barang (52), satuan kerja diminta untuk melakukan penyesuaian ralat / koreksi atas tagihan SPM yang telah realisasi yang menjadi penyebab pagu minus selanjutnya apabila memungkinkan dilakukan revisi DIPA sesuai dengan kewenangannya.

1.5 Hasil

Setiap periodenya, keterjadian pagu minus pada satuan kerja selalu berulang, namun dapat dipastikan bahwa pada setiap akhir periode Tahun Anggaran seperti kejadian setiap akhir periode Tahun Anggaran sebelumnya di KPPN Solok, seluruh pagu minus diharapkan dapat diselesaikan baik dengan mekanisme ralat/koreksi SPM maupun revisi DIPA

4. Serapan DAK Fisik Tidak Maksimal

1.1 Rumusan Masalah

Walaupun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, realisasi penyaluran Dana Desa sudah mencapai 100% pada Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran DAK Fisik pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan hanya mencapai 86,63%. Hal ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dalam DAK Fisik yang belum bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19, pergeseran alokasi anggaran di daerah, perubahan metode penyaluran, keterbatasan koordinasi dan penyampaian informasi di daerah serta keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia di daerah.

1.2 Penyebab

- a) Perencanaan data kontrak oleh Pemda berubah sebagai akibat pergantian Kepala Daerah

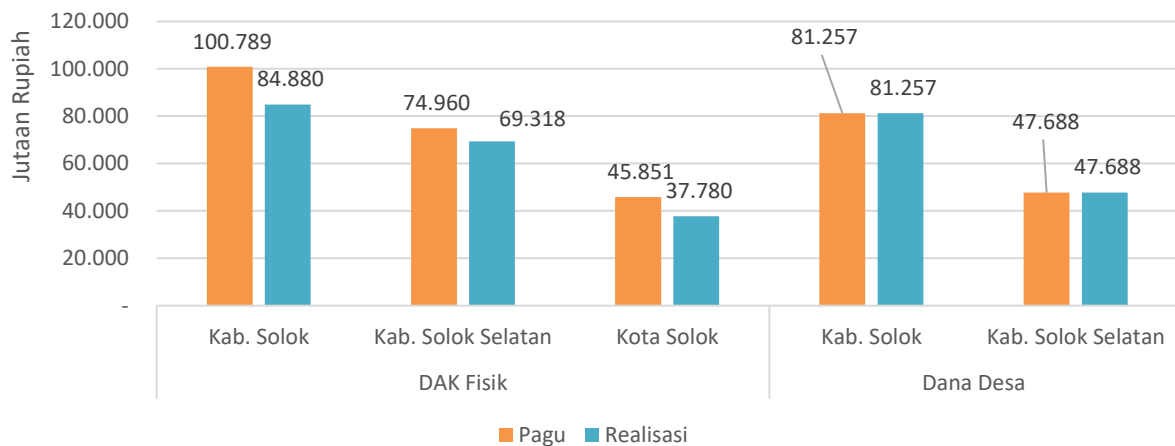
- b) Keterbatasan tenaga pendamping mengakibatkan keterlambatan dalam input realisasi BLT (Bantuan Langsung Tunai)
- c) Kondisi pandemi COVID-19

1.3 Keterjadian

Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2021 adalah 93,32%, dengan rincian realisasi penyaluran Dana Desa sudah mencapai 100% pada Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran DAK Fisik pada Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan hanya mencapai 86,63%. Realisasi yang kurang optimal adalah realisasi belanja DAK Fisik, sedangkan penyaluran Dana Desa sudah tersalur 100%. Kurang optimalnya penyaluran DAK Fisik disebabkan adanya kegiatan-kegiatan dalam DAK Fisik yang belum bisa dilakukan karena kondisi pandemi COVID-19, pergeseran alokasi anggaran di daerah, dan batas waktu penyaluran yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat melaksanakan penyaluran dan penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

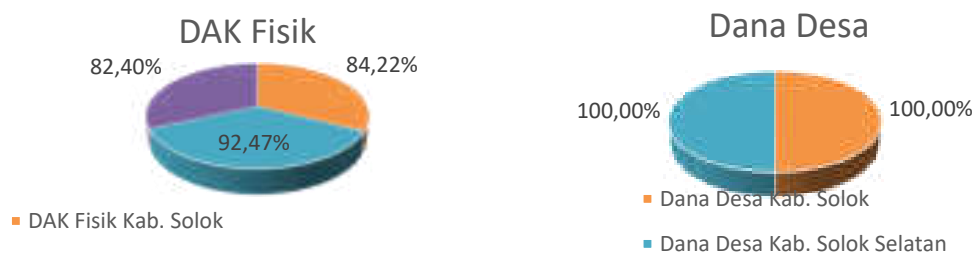
Grafik 3.4.1

Pagu dan Realisasi DFDD TA 2021



Grafik 3.4.2

Presentase Pagu dan Realisasi DFDD TA 2021



1.4 Penyelesaian Masalah

Berusaha untuk aktif dalam *update* peraturan terkait dengan relaksasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, menampung setiap permasalahan di Pemda serta meneruskan ke kantor pusat apabila tidak tertangani di level KPPN Solok dan meningkatkan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi.

1.5 Hasil

Realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mengalami peningkatan pada periode Semester II TA 2021. Kepastian pengelola Keuangan Daerah dan mulai meredanya pandemi COVID-19 dengan pelanggaran PPKM sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan khususnya yang melibatkan pertemuan langsung dengan masyarakat. Walaupun belum maksimal, akan tetapi secara rata-rata untuk realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa wilayah kerja KPPN Solok pada periode TA 2021 mencapai 93,32%.

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Satuan Kerja yang Belum Maksimal

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil monev dan pemantauan terhadap satker diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM satker umumnya cukup kompeten, namun demikian kualitas yang bagus ini tidak sebanding dengan beban kerja dan kuantitas pekerjaan yang dimilikinya. Akibatnya beberapa satker dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan kompetensi yang terbatas mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pengelola keuangan.

1.2 Penyebab

- a) Beban kerja yang tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia
- b) Komitmen dari pimpinan satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan yang masih rendah

1.3 Keterjadian

Komitmen dari pimpinan satuan kerja terhadap pengelolaan keuangan sangat rendah sehingga pengawasan kinerja satuan kerja tidak berjalan dengan baik, untuk hal-hal yang

bersifat kebijakan dibidang keuangan terkadang *staff* pengelola keuangan secara mandiri merencanakan dan melaksanakan penyerapan anggaran satuan kerja. Hal ini tentu bertolak belakang dengan upaya Ditjen Perbendaharaan yang mulai menggalakkan jabatan-jabatan fungsional bidang perbendaharaan, seperti jabatan fungsional pranata keuangan APBN dan analis pengelola keuangan APBN. Jabatan-jabatan tersebut merupakan pejabat perbendaharaan yang selama ini beberapa melekat pada jabatan struktural sehingga pejabat tersebut kurang fokus dalam penyelesaian pekerjaan sebagai pejabat perbendaharaan. Selain itu, perlunya pengakuan akan kompetensi pejabat dimaksud agar memiliki standar dalam penyelesaian pekerjaannya.

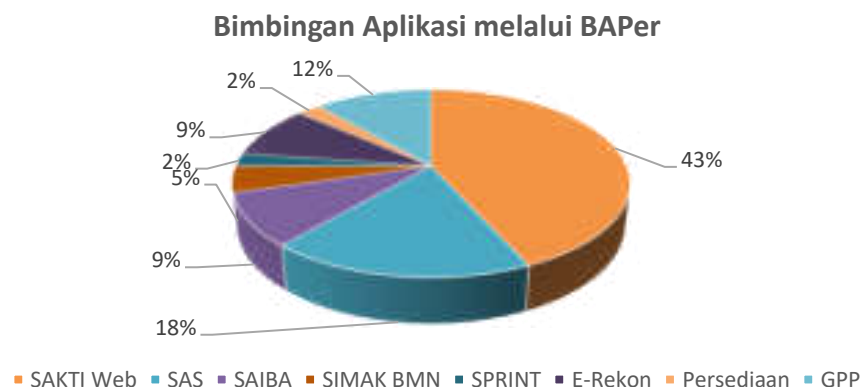
1.4 Penyelesaian Masalah

- a) Secara rutin menginformasikan *e-Learning* pada portal klc2.kemenkeu.go.id kepada satker untuk diikuti sebagai sarana peningkatan kompetensi.
- b) Mengembangkan inovasi BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan) sebagai sarana bagi satker mengembangkan kompetensi diri.

Layanan Perbendaharaan yang diminta satuan kerja melalui inovasi BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan) adalah aplikasi yang digunakan satuan kerja dalam rangka pencairan dana di KPPN. Sebagian besar satuan kerja ingin bimbingan dengan SAKTI Web karena aplikasi tersebut sangat dibutuhkan satuan kerja untuk persiapan pembayaran Gaji Induk Januari 2022. Bimbingan aplikasi yang dibutuhkan satuan kerja sebagaimana tergambar pada grafik 5.4.1.

Grafik 3.5.1

1.



Dari data BAPer yang masuk, selama tahun 2021, terdapat 44 satuan kerja yang memanfaatkan BAPer sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi di bidang perbendaharaan sebagaimana tergambar pada tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 3.5.1
Bimbingan Satuan Kerja melalui BAPer

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	TANGGAL BIMBINGAN	NAMA OPERATOR	APLIKASI
1	019962	BPS Kota Solok	18 Juni 2021	Nurhafidzah	SAKTI Web
2	401397	Kantor Pertanahan Kota Solok	18 Juni 2021	Surya Nela	SAKTI Web
3	019979	BPS Kab. Solok	18 Juni 2021	Alex Kandria	SAKTI Web
4	406033	Cabang Rutan Alahan Panjang	19 Juni 2021	Darmes Saputra	SAS
5	401922	Pengadilan Agama Solok	19 Juni 2021	Febrianto	SAKTI Web
6	098785	Pengadilan Negeri Solok	19 Juni 2021	Harly Bastian, SH, MH	SAKTI Web
7	006664	Kejari Solok	19 Juni 2021	Endang Dwi Astuti	SAS
8	401984	Pengadilan Agama Muara Labuh	19 Juni 2021	Willia H	SAIBA
9	673648	Kejaksaan Negeri Solok Selatan	19 Juni 2021	M Irfan	GPP
10	673648	Kejaksaan Negeri Solok Selatan	20 Juni 2021	Jasril	SAKTI Web
11	400446	Pengadilan Negeri Kotobaru	20 Juni 2021	Febri Charlin, SE	SAKTI Web
12	006664	Kejari Solok	21 Juni 2021	Jaya Hidayat	E-Rekon
13	406033	Cabang Rutan Alahan Panjang	21 Juni 2021	Laila Fitri	SAIBA

14	406033	Cabang Rutan Alahan Panjang	21 Juni 2021	Darmes Saputra	GPP
15	299610	MTsN 1 Pasir Talang	21 Juni 2021	Fatima Hilda, SE	SAKTI Web
16	299743	Kementerian Agama Kota Solok	22 Juni 2021	Rahmi Mardiyah	SAKTI Web
17	412050	Balitbu Tropika Solok	23 Juni 2021	Iswanto	SAIBA
18	412050	Balitbu Tropika Solok	23 Juni 2021	Elendrianti	SAS
19	299743	Kemenag Kota Solok	23 Juni 2021	Rahmi Mardiyah	GPP
20	400446	Pengadilan Negeri Kotobaru	04 Juli 2021	Febri Charlin, SE	SIMAK BMN
21	401984	Pengadilan Agama Kotobaru	04 Juli 2021	Wiwianto	SAKTI Web
22	006664	Kejaksaan Negeri Solok	04 Juli 2021	Jaya Hidayat	E-Rekon
23	401922	Pengadilan Agama Solok	05 Juli 2021	Nelzi Lufan Nova	SAS
24	401990	Pengadilan Agama Muara Labuh	05 Juli 2021	Syafrizal	E-Rekon
25	006728	Cabjari Alahan Panjang	05 Juli 2021	Dahlia Mustika	SAS
26	006728	Cabjari Alahan Panjang	05 Juli 2021	Sandra Khomeini	SAKTI Web
27	575879	MAN 2 Kab. Solok	06 Juli 2021	Reni Petriyanti	SAS
28	656091	KPU Kab. Solok	06 Juli 2021	Yona Frima Diana	SAS
29	299610	MTsN 1 Kab. Solok Selatan	09 Juli 2021	Fatima Hilda, SE	SPRINT
30	006728	Cabjari Alahan Panjang	09 Juli 2021	Dahlia Mustika	GPP
31	601763	MTsN 6 Solok	09 Juli 2021	Rahmi Yati	SAKTI Web
32	601770	MTsN Tembok KAcang	09 Juli 2021	Muhardes, ST	SAKTI Web

33	299610	MTsN 1 Kab. Solok Selatan	19 Agustus 2021	Fatima Hilda, SE	GPP
34	066664	Kejaksaan Negeri Solok	19 Agustus 2021	Jaya Hidayat	E-Rekon
35	412050	Balitbu Tropika Solok	20 Agustus 2021	Wanto	SAKTI Web
36	412050	Balitbu Tropika Solok	20 Agustus 2021	Elendriati	SAKTI Web
37	424911	MAN 1 Solok	20 Agustus 2021	Nova Silfiana	SAKTI Web
38	412050	Balitbu Tropika Solok	20 Agustus 2021	Iswanto	SAS
39	567449	BPTP Sumatera Barat	22 Agustus 2021	Leni Febria	SAKTI Web
40	424101	MAN Kota Solok	23 Agustus 2021	Edwin Saleh	SAKTI Web
41	019962	BPS Kota Solok	23 Agustus 2021	Nurhafidzah	SAIBA
42	299563	Kementerian Agama Kab. Solok	23 Agustus 2021	Andika Putra Mulyawan	SIMAK BMN
43	006728	Cabjari Solok Alahan Panjang	23 Agustus 2021	Sandar Khomeini	Persediaan
44	552996	MTsN Kota Solok	04 September 2021	Melda Setria Dona,S.Pd.I	SAKTI Web

1.4 Hasil

Satuan kerja semakin memahami pengelolaan keuangan APBN dan berperan aktif dalam peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran.



BAB 4

EARLY WARNING TA 2022

REVIU PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN 2021

Memasuki awal tahun 2022, kita masih dihadapkan akan ketidakpastian kondisi perekonomian tahun ini. *Early warning* harus segera dilakukan KPPN dalam rangka melakukan mitigasi risiko atas ketidakpastian yang mungkin terjadi. Potensi masalah yang bisa kita mitigasi adalah sebagai berikut:

1. Varian baru Covid-19

Adanya Varian baru Covid-19 merupakan ketidakpastian paling besar di tahun 2022. Ketidakpastian ini lantaran kembali merebaknya varian Covid-19 dengan jenis baru Omicron yang baru-baru ini muncul di berbagai negara. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengendalikan Covid-19 melalui percepatan penyuntikan vaksinasi Covid-19 dan memperketat penerapan disiplin protokol kesehatan. Selain itu, di tahun depan pemerintah juga akan mendukung berbagai langkah penanganan Covid-19 dengan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional yang mengakomodir penanganan dari sisi kesehatan hingga program untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Mitigasi risiko dan pencegahan yang dapat dilakukan KPPN adalah melakukan edukasi kepada satuan kerja untuk segera mempercepat realisasi pada awal tahun, sehingga perekonomian daerah tetap berjalan, program pemerintah segera dilaksanakan untuk mencegah dampak pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatan maupun dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

2. Implementasi SAKTI

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Dimana kita ketahui bersama, bahwa tahun 2022 merupakan tahun untuk *rollout* SAKTI kepada seluruh satker pengguna APBN. Sebagai suatu aplikasi baru, hal ini merupakan tantangan bagi satker untuk melakukan pengelolaan APBN dalam satu aplikasi. Perubahan bukan hanya secara sistem, akan tetapi cara kerja satker juga harus berubah. KPPN harus senantiasa menjaga komunikasi dalam rangka melakukan edukasi ke satker dalam rangka implementasi SAKTI.

3. Implementasi Digipay

Sesuai dengan nilai Kesempurnaan dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, dibutuhkan inovasi pengelolaan Kas Negara, yang dapat terus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Era revolusi industri 4.0 mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan teknologi

informasi yang harus diterapkan juga pada pelayanan pemerintah kepada para *stakeholders*. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah digitalisasi dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bersama, belanja pemerintah dilakukan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke penerima dan/atau melalui Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Untuk mendukung penerapan digitalisasi tersebut, salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan adalah penggunaan uang persediaan melalui *Digital Payment Marketplace* (Digipay). Pengembangan Digipay mengintegrasikan proses pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporan dalam satu ekosistem sehingga terjadi simplifikasi sejak proses pengadaan hingga proses pertanggungjawaban. Selain itu, pengembangan Digipay akan mendukung penggunaan kartu kredit pemerintah dan CMS *virtual account* dalam pembayaran belanja pemerintah. Implementasi Digipay lingkup KPPN Solok masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari jumlah satker yang bergabung dan bertransaksi melalui Digipay. KPPN mempunyai tugas untuk mengawal implementasi Digipay di daerah. Bersama dengan satker, vendor dan perbankan, perlu ditingkatkan sinergi untuk meningkatkan partisipasi para *stakeholders* dalam rangka implementasi Digipay.

4. Kompetensi Pengelola Keuangan Satker

Masalah selanjutnya adalah kompetensi pengelola keuangan satker yang masih belum merata. Masalah ini merupakan salah satu masalah yang selalu berulang setiap tahun. Edukasi yang dilakukan oleh KPPN kepada satker perlu lebih ditingkatkan atau membuat suatu inovasi baru untuk meningkatkan kompetensi pengelola keuangan satker. Salah satu inovasi yang dikembangkan KPPN Solok adalah inovasi BAPer (Bimbingan Aplikasi Perbendaharaan) yang dapat digunakan sebagai sarana bagi satker mengembangkan kompetensi diri. Bimbingan tersebut dapat dilakukan secara daring (zoom meeting) dan luring secara langsung di KPPN. Satker dapat memanfaatkan inovasi BAPer untuk menerima edukasi terkait layanan perbendaharaan seperti SAKTI, Digipay, Aplikasi PPNPN dan petunjuk teknis lainnya dalam rangka meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan satker. Dari sisi KPPN, inovasi BAPer dapat digunakan sebagai dasar *clusterisasi* kompetensi satker, sehingga dapat melihat progres dan kompetensi setiap satker dalam rangka pelaksanaan APBN.

5. Pergantian Pejabat Pengelola DAK Fisik dan Dana Desa di Pemda

Salah satu hal penting dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah pengelola keuangan yang kompeten pada setiap Pemda. Permasalahan yang perlu dimitigasi di Pemda adalah pergantian petugas pengelola DAK Fisik dan Dana Desa. Seperti yang kita ketahui, pengelola DAK Fisik dan Dana Desa harus mempunyai kompetensi dan dapat bekerjasama dengan KPPN dalam rangka penyaluran dana tersebut. Akan tetapi, masih ada Pemda yang melakukan pergantian petugas di tengah tahun atau bahkan dalam satu tahun ada beberapa pergantian petugas pengelola DAK Fisik dan Dana Desa. Hal ini perlu menjadi perhatian KPPN untuk senantiasa meningkatkan sinergi dan edukasi ke Pemda, khususnya untuk meningkatkan kompetensi petugas pengelola dana di Pemda. Untuk mengatasi hal tersebut, KPPN perlu melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Pemda terkait penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. MoU tersebut berisi sinergi dalam rangka peningkatan kompetensi, pertukaran data dan ekspose penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara periodik. Hal tersebut penting untuk meningkatkan branding image KPPN dan Pemda dalam pengelolaan dana APBN di wilayah kerja masing-masing, sehingga masyarakat dan para *stakeholders* mengetahui progres dan hasil dari penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam meningkatkan roda perekonomian di daerah.

6. Keterbatasan Jumlah Trainer SAKTI dan PTPN

Hal yang penting dalam rangka edukasi kepada satker adalah adanya petugas KPPN yang secara khusus bertanggung jawab, seperti Trainer SAKTI dan PTPN. Pelaksanaan edukasi kepada satker selama ini dilakukan oleh petugas CSO dan SSO, dimana petugas tersebut juga mempunyai tugas sehari-hari yang harus diselesaikan. Trainer SAKTI dan PTPN sangat dibutuhkan untuk kelancaran *sharing knowledge* kepada satker dan stakeholder lainnya, karena banyak hal baru yang membutuhkan pendampingan dari KPPN, khususnya dalam hal digitalisasi pengelolaan APBN seperti SAKTI dan Digipay. Peran KPPN menjadi sangat penting dalam mendukung dan memastikan kelancaran proses dimaksud, karena KPPN merupakan ujung tombak setiap perubahan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan keberadaan Ditjen Perbendaharaan di tengah-tengah masyarakat, kita hadir bukan hanya sebagai penyalur dana APBN, juga berperan sebagai guru untuk *sharing knowledge* perubahan untuk menjadi lebih baik.